

Nama : Diah Rachmawati Syukri
NPM : 2523031003
Mata Kuliah : STUDI SOSIAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN
Dosen : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd., dan Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.,
Dr. Niki Tri Sakung, M.Pd.

UJIAN TENGAH SEMESTER

1. Sebuah daerah pesisir di Indonesia mengalami penurunan hasil tangkapan ikan selama 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh overfishing, perubahan iklim, dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Dampaknya, pendapatan nelayan menurun drastis, angka kemiskinan meningkat, dan terjadi migrasi tenaga kerja ke kota. Pemerintah daerah telah mencoba memberikan bantuan subsidi, namun belum menunjukkan hasil signifikan. **Pertanyaan 1. Analisislah akar permasalahan ekonomi yang terjadi dengan menggunakan pendekatan multidisipliner (ekonomi, sosial, dan lingkungan). 2. Evaluasi kebijakan pemerintah yang telah dilakukan. 3. Rancanglah solusi inovatif berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. 4. Jelaskan bagaimana peran pendidikan IPS dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.**

Jawaban:

Kasus penurunan hasil tangkapan ikan di daerah pesisir Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masyarakat nelayan tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah produksi perikanan semata, tetapi merupakan krisis multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika tidak ditangani secara sistematis, dampaknya akan memperluas kemiskinan struktural, pengangguran, dan ketimpangan wilayah pesisir (World Bank, 2025).

1. Analisis Akar Permasalahan Ekonomi dengan Pendekatan Multidisipliner

a. Perspektif Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi sumber daya, overfishing menyebabkan penurunan stok ikan sehingga hasil tangkapan terus menurun. Kondisi ini sejalan dengan konsep *tragedy of the commons*, yaitu ketika sumber daya bersama dieksploitasi berlebihan karena lemahnya pengawasan dan setiap individu berusaha memperoleh keuntungan pribadi (Hardin, 1968). Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh dan lebih lama untuk mendapatkan hasil yang sama.

Kondisi tersebut meningkatkan biaya operasional seperti bahan bakar, es batu, dan logistik. Ketika biaya meningkat tetapi hasil tangkapan menurun, pendapatan riil nelayan mengalami penurunan drastis. Selain itu, struktur pasar perikanan di

banyak daerah masih dikuasai tengkulak, sehingga nelayan kecil sering menjual hasil tangkapannya dengan harga rendah (Stacey et al., 2021).

b. Perspektif Sosial

Turunnya pendapatan nelayan berdampak langsung pada kesejahteraan rumah tangga. Keluarga nelayan mengalami penurunan daya beli, kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, dan pangan bergizi. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan kemiskinan antargenerasi.

Migrasi tenaga kerja ke kota menjadi pilihan rasional karena sektor perikanan tidak lagi menjanjikan. Namun, banyak migran pesisir yang tidak memiliki keterampilan memadai sehingga bekerja di sektor informal berupah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan tenaga kerja belum tentu menyelesaikan masalah, tetapi hanya memindahkan pusat kemiskinan dari desa ke kota (Todaro & Smith, 2014).

Selain itu, persaingan memperebutkan sumber daya laut yang semakin sedikit juga berpotensi menimbulkan konflik sosial antar nelayan tradisional dan nelayan bermodal besar.

c. Perspektif Lingkungan

Perubahan iklim memperburuk kondisi perikanan pesisir melalui kenaikan suhu laut, cuaca ekstrem, perubahan arus laut, serta perpindahan jalur migrasi ikan. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan suhu permukaan laut berdampak pada produktivitas perikanan tangkap di Indonesia (World Bank, 2025).

Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau, bom ikan, atau racun juga merusak terumbu karang dan habitat pemijahan ikan. Jika habitat rusak, kemampuan ekosistem laut untuk memulihkan stok ikan akan menurun (FAO, 2022).

Dengan demikian, akar masalah utama terletak pada kombinasi eksploitasi berlebihan, lemahnya tata kelola sumber daya, ketergantungan ekonomi tunggal pada sektor tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir.

2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah yang Telah Dilakukan

Pemerintah daerah telah memberikan subsidi kepada nelayan, namun hasilnya belum signifikan. Kebijakan ini perlu dievaluasi secara kritis.

a. Kelebihan Kebijakan Subsidi

Subsidi mampu membantu nelayan bertahan dalam jangka pendek, terutama ketika harga BBM naik atau hasil tangkapan menurun. Bantuan ini juga dapat menjaga konsumsi rumah tangga miskin pesisir.

b. Kelemahan Kebijakan Subsidi

Subsidi memiliki beberapa kelemahan mendasar, diantaranya :

Pertama, subsidi hanya bersifat kuratif, bukan preventif. Bantuan dana tidak menyelesaikan penyebab utama seperti overfishing dan kerusakan laut.

Kedua, subsidi dapat mendorong eksploitasi berlebihan jika diberikan dalam bentuk bahan bakar atau alat tangkap tanpa regulasi ketat. Studi *Marine Policy* menyebutkan subsidi perikanan yang tidak tepat sasaran dapat meningkatkan kapasitas tangkap dan mempercepat overfishing (Marine Policy, 2024).

Ketiga, subsidi sering tidak tepat sasaran karena lebih mudah diakses kelompok yang dekat dengan birokrasi, sementara nelayan kecil tertinggal.

Keempat, kebijakan subsidi belum menyentuh sektor hilir seperti pengolahan ikan, pemasaran digital, dan peningkatan nilai tambah produk. Artinya, kebijakan pemerintah masih berorientasi jangka pendek dan belum mendorong transformasi ekonomi pesisir.

3. Solusi Inovatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

a. Pengelolaan Perikanan Berbasis Komunitas (*Co-management*)

Pemerintah perlu melibatkan kelompok nelayan dalam menentukan zona tangkap, musim penutupan, ukuran ikan layak tangkap, dan pengawasan laut. Model partisipatif terbukti lebih efektif karena masyarakat merasa memiliki aturan (Ostrom, 1990).

b. Diversifikasi Mata Pencaharian

Masyarakat pesisir perlu didorong memiliki sumber pendapatan alternatif, seperti:

- budidaya ikan dan udang,
- budidaya rumput laut,
- wisata mangrove,
- usaha pengolahan hasil laut,
- UMKM perempuan pesisir.

Diversifikasi penting agar ekonomi rumah tangga tidak hanya bergantung pada hasil tangkap laut (FAO, 2022).

c. Restorasi Ekosistem Laut

Program rehabilitasi mangrove, transplantasi karang, dan perlindungan daerah pemijahan ikan harus dijadikan prioritas. Ekosistem yang sehat akan meningkatkan produktivitas laut dalam jangka panjang.

d. Digitalisasi Nelayan

Nelayan perlu diberi akses teknologi seperti aplikasi cuaca, informasi harga ikan, navigasi laut, dan pemasaran daring agar tidak bergantung pada tengkulak.

e. Penguatan Kelembagaan Ekonomi

Pembentukan koperasi nelayan modern sangat penting untuk menyediakan akses modal, asuransi nelayan, tabungan kelompok, dan pemasaran kolektif.

4. Peran Pendidikan IPS dalam Menyelesaikan Masalah

Pendidikan IPS memiliki peran strategis karena membahas hubungan manusia, ekonomi, ruang, dan lingkungan.

a. Menumbuhkan Literasi Ekonomi

Siswa dapat memahami konsep produksi, distribusi, koperasi, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan keluarga nelayan.

b. Menanamkan Kesadaran Lingkungan

Melalui IPS, siswa belajar bahwa eksploitasi berlebihan akan merugikan generasi masa depan. Pendidikan dapat menanamkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Melatih Berpikir Kritis

Siswa dapat menganalisis mengapa subsidi gagal, mengapa migrasi terjadi, dan bagaimana solusi berbasis masyarakat dirancang. Ini akan meningkatkan kemampuan *critical thinking* (Banks, 2017).

d. Pembelajaran Kontekstual

Guru IPS dapat menggunakan studi kasus daerah pesisir sebagai bahan diskusi, proyek sosial, dan penelitian lapangan sehingga siswa memahami masalah nyata di sekitarnya.

e. Menyiapkan Generasi Inovatif

Melalui pendidikan IPS berbasis kewirausahaan sosial, generasi muda pesisir dapat menciptakan usaha lokal tanpa harus meninggalkan daerah asal.

Referensi :

Banks, J. A. (2017). *Citizenship Education and Global Migration*. Washington: AERA.

FAO. (2022). *Small-Scale Fisheries in Indonesia*. Rome: Food and Agriculture Organization.

Marine Policy. (2024). Fisheries subsidies and overfishing policy in Indonesia. *Marine Policy Journal*.

Stacey, N., et al. (2021). Sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia. *Marine Policy*, 132, 104654.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.

World Bank. (2025). *Hot Water Rising: The Impact of Climate Change on Indonesia Fisheries and Coastal Communities*. Washington DC.

2. **Dinamika ekonomi mutakhir seperti perkembangan ekonomi digital dewasa ini, sejatinya, membuka peluang peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam dunia kerja melalui wirausaha digital. Wirausaha perempuan dapat memanfaatkan transformasi digital baik sebagai kreator maupun penerima manfaat (beneficiary). Kewirausahaan (entrepreneurship) digital perempuan menawarkan fleksibilitas antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Perempuan menjadi wirausaha juga acap dinilai sebagai solusi dari diskriminasi dan ketidakpuasan kaum perempuan terhadap dunia kerja reguler (Heilman dan Chen, 2003). Selain itu, peluang laki-laki dan perempuan setara dalam digital entrepreneurship. Namun, berbagai kendala sosial, normatif, dan tingkat pendidikan ditengarai menjadi batu sandungan bagi keterlibatan lebih besar kaum perempuan dalam wirausaha digital termasuk aktivitas jual beli secara elektronik (e-commerce). Sebagai contoh, jumlah wanita tercatat lebih dari 52% dari populasi Eropa tetapi hanya 34,4% dari para wirausaha di Uni Eropa yang berjenis kelamin perempuan. Faktanya, kesenjangan ini justru meningkat dengan digitalisasi ekonomi. Menurut laporan Komisi Uni Eropa, ketimpangan meningkat terlihat dari jumlah perempuan yang kurang terwakili di semua sektor ekonomi digital. Persentase laki-laki bekerja di industri digital tiga kali lebih besar dibanding perempuan. Jumlah perempuan hanya mencapai 21,5% dari seluruh pekerja ekonomi digital pada tahun 2015. Sumber: <https://analisis.kontan.co.id/news/potensi-wirausaha-digital-perempuan>**

Berdasarkan kutipan berita di atas: 1) Berikan pandangan-pandangan Anda tentang ekonomi di era digital? 2) Bagaimana pendapat Anda tentang potensi kewirausahaan dan partisipasi wanita dalam perkembangan dunia usaha dan industry? 3) Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam mensikapi ketimpangan persentase laki-laki bekerja di industry 3x lebih besar dibandingkan dengan perempuan? Berikan analisis Anda!

Jawaban:

Perkembangan ekonomi digital merupakan salah satu transformasi terbesar dalam sistem ekonomi global abad ke-21. Digitalisasi mengubah cara produksi, distribusi, konsumsi, hingga hubungan kerja. Kehadiran internet, platform e-commerce, fintech, media sosial, dan kecerdasan buatan telah menciptakan model bisnis baru yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien. Namun, di balik peluang tersebut, masih terdapat ketimpangan partisipasi gender, khususnya dalam kewirausahaan digital dan industri teknologi. Karena itu, ekonomi digital harus dibaca bukan hanya sebagai kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai arena baru pertarungan akses, keadilan, dan inklusi sosial.

1. Pandangan tentang Ekonomi di Era Digital

Menurut saya, ekonomi di era digital adalah fase perkembangan ekonomi yang ditandai oleh dominasi teknologi informasi sebagai penggerak utama produktivitas dan pertumbuhan. Dalam konsep *digital economy*, data menjadi sumber daya baru, platform menjadi pasar baru, dan konektivitas menjadi modal penting. Tapscott (2014) menjelaskan bahwa ekonomi digital mengandalkan jaringan global yang memungkinkan transaksi lintas batas berlangsung secara real-time dengan biaya rendah.

Secara positif, ekonomi digital membuka peluang besar. Pertama, menurunkan hambatan masuk usaha. Dahulu seseorang harus memiliki toko fisik dan modal besar untuk berdagang. Kini, melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop, individu bisa memulai usaha hanya dengan smartphone dan koneksi internet. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru, seperti content creator, digital marketer, dropshipper, freelancer, dan software developer. Ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi, karena distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat.

Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital terus meningkat. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2024) menunjukkan nilai ekonomi digital Indonesia termasuk terbesar di Asia Tenggara, terutama didorong oleh e-commerce dan layanan digital. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan tren sementara, tetapi struktur ekonomi baru. Namun demikian, ekonomi digital juga memiliki sisi kritis. Tidak semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Terjadi digital divide, yaitu kesenjangan akses internet, literasi digital, modal, dan kemampuan teknologi. Kelompok perempuan, masyarakat desa, dan kelas ekonomi bawah sering tertinggal. Selain itu, ekonomi digital juga melahirkan kerja informal berbasis platform yang kadang tidak memberi perlindungan sosial memadai.

Jadi, ekonomi digital adalah peluang besar, tetapi manfaatnya tidak otomatis merata. Tanpa kebijakan inklusif, digitalisasi justru dapat memperlebar ketimpangan lama dalam bentuk baru.

2. Potensi Kewirausahaan dan Partisipasi Wanita dalam Dunia Usaha dan Industri

Saya memandang potensi kewirausahaan perempuan di era digital sangat besar. Bahkan, ekonomi digital bisa menjadi ruang yang relatif lebih terbuka dibanding ekonomi konvensional. Mengapa demikian? Karena teknologi memungkinkan perempuan menjalankan usaha dari rumah, mengatur waktu kerja fleksibel, dan menjangkau pasar luas tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestik secara penuh.

Teori Human Capital dari Becker (1993) menyatakan bahwa produktivitas seseorang dipengaruhi pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Banyak perempuan memiliki kemampuan manajerial, kreativitas, dan ketelitian tinggi,

sehingga berpotensi unggul dalam bisnis digital seperti fashion, kuliner, pendidikan online, kerajinan, jasa desain, hingga pemasaran digital.

Di Indonesia, banyak UMKM justru digerakkan perempuan. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut sekitar 64 juta UMKM Indonesia menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, dan sebagian besar pelaku usaha mikro adalah perempuan. Ini berarti perempuan bukan pelengkap ekonomi, tetapi aktor utama ekonomi rakyat.

Selain itu, kewirausahaan perempuan memberi multiplier effect sosial. Pendapatan perempuan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kebutuhan rumah tangga. Artinya, memberdayakan perempuan melalui bisnis digital bukan hanya menaikkan pendapatan individu, tetapi juga kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya.

Partisipasi perempuan masih menghadapi beberapa hambatan, diantaranya :

- 1) Pertama, hambatan sosial-budaya. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan masih dianggap bertanggung jawab utama pada urusan domestik sehingga waktu dan energi untuk usaha terbatas.
- 2) Kedua, hambatan akses modal. Banyak perempuan kesulitan memperoleh kredit karena minim aset atau agunan.
- 3) Ketiga, hambatan literasi digital dan STEM. Partisipasi perempuan di sektor teknologi masih rendah karena stereotip bahwa teknologi adalah bidang laki-laki.
- 4) Keempat, hambatan jaringan bisnis. Laki-laki cenderung memiliki jejaring bisnis lebih luas sehingga lebih mudah berkembang.

Karena itu, saya berpendapat bahwa perempuan memiliki potensi sangat besar, tetapi potensinya belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan ekonomi akibat kendala struktural.

3. Peran Pemerintah Mengatasi Ketimpangan Gender di Industri Digital

Jika laki-laki bekerja di industri digital tiga kali lebih besar dibanding perempuan, maka ini menunjukkan adanya *market failure* dan ketidaksetaraan akses. Pemerintah tidak boleh netral, tetapi harus aktif menciptakan level playing field.

a. Pendidikan dan Literasi Digital Perempuan

Pemerintah perlu memperluas pelatihan digital khusus perempuan: coding, pemasaran digital, desain grafis, pengelolaan toko online, AI tools, dan keuangan digital. Program seperti Kartu Prakerja dapat diarahkan lebih spesifik untuk perempuan, terutama ibu rumah tangga dan perempuan desa. Menurut World Bank (2022), peningkatan keterampilan digital perempuan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja dan pendapatan.

b. Akses Permodalan Inklusif

Negara perlu menyediakan kredit mikro berbunga rendah bagi women-led business, tanpa syarat agunan berat. Bisa melalui KUR khusus perempuan, fintech terregulasi, atau inkubasi startup perempuan.

c. Infrastruktur Digital Merata

Banyak perempuan di daerah tertinggal belum menikmati internet stabil. Pemerintah harus mempercepat pemerataan jaringan internet, karena tanpa akses internet, semua wacana ekonomi digital hanya menjadi slogan.

d. Kebijakan Ramah Gender di Dunia Kerja

Industri digital perlu didorong menerapkan cuti melahirkan, fleksibilitas kerja, daycare, anti diskriminasi rekrutmen, dan equal pay. Jika tempat kerja ramah perempuan, maka partisipasi meningkat.

e. Kampanye Sosial dan Perubahan Budaya

Ketimpangan gender tidak hanya soal ekonomi, tetapi norma sosial. Pemerintah bersama media dan pendidikan harus menghapus stereotip bahwa teknologi hanya cocok untuk laki-laki. Role model perempuan di bidang teknologi perlu diperbanyak.

f. Data Gender Berbasis Bukti

Pemerintah perlu menyediakan data berkala tentang partisipasi perempuan di startup, e-commerce, STEM, dan industri digital agar kebijakan tepat sasaran.

Referensi :

Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. University of Chicago Press.

Google, Temasek, & Bain & Company. (2024). *e-Conomy SEA Report*.

Heilman, M. E., & Chen, J. J. (2003). Entrepreneurship as a solution: The allure of self-employment for women and minorities. *Human Resource Management Review*, 13(2), 347–364.

Tapscott, D. (2014). *The Digital Economy*. McGraw-Hill.

World Bank. (2022). *Women, Business and the Law Report*.

3. Jelaskan keterkaitan ekonomi dalam konteks pembelajaran IPS? Bagaimanakah seharusnya pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan didesain dan diterapkan di persekolahan dalam upaya mengembangkan skills dan jiwa entrepreneur, sertakan contohnya.

Jawaban:

Ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam konteks pembelajaran IPS karena ekonomi merupakan salah satu dimensi penting dalam kajian IPS selain sejarah, geografi, sosiologi, dan politik. IPS mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan ekonomi menelaah bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup melalui pengelolaan sumber daya yang terbatas.

Karena itu, pembelajaran ekonomi dalam IPS berfungsi membantu peserta didik memahami realitas sosial secara lebih utuh, terutama terkait produksi, distribusi, konsumsi, dan pengambilan keputusan ekonomi (Sapriya, 2017).

Dalam kehidupan sehari-hari, siswa selalu berhadapan dengan persoalan ekonomi, misalnya mengelola uang saku, menentukan prioritas kebutuhan, memilih barang yang akan dibeli, hingga memahami naik turunnya harga kebutuhan pokok. Situasi ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi sangat dekat dengan pengalaman peserta didik. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2010), ekonomi adalah studi mengenai bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa ekonomi bukan sekadar uang dan perdagangan, tetapi juga menyangkut pilihan rasional di tengah keterbatasan.

Dalam pembelajaran IPS, ekonomi juga berperan membentuk *economic citizenship*, yaitu warga negara yang mampu membuat keputusan ekonomi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Peserta didik perlu memahami pentingnya menabung, menghindari perilaku konsumtif, menghargai produk lokal, serta memahami peran pajak dalam pembangunan negara. Dengan demikian, pembelajaran ekonomi memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan karakter warga negara yang cerdas secara finansial dan sosial (Mankiw, 2018).

Selain itu, urgensi pembelajaran ekonomi semakin kuat jika dikaitkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kelompok usia muda masih mendominasi angka pengangguran terbuka, yang menandakan bahwa lulusan sekolah sering kali belum memiliki kesiapan kerja maupun kemampuan menciptakan usaha sendiri (BPS, 2025). Oleh sebab itu, sekolah tidak cukup hanya menyiapkan siswa menjadi pencari kerja (*job seeker*), tetapi juga pencipta lapangan kerja (*job creator*).

Desain Pembelajaran Ekonomi dan Kewirausahaan di Sekolah

Pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan seharusnya didesain secara kontekstual, aplikatif, dan berpusat pada peserta didik. Model pembelajaran tidak boleh berhenti pada hafalan konsep permintaan, penawaran, pasar, atau laba-rugi, tetapi harus memberi pengalaman nyata dalam mengelola usaha. Pendekatan seperti *Project Based Learning (PjBL)*, *Problem Based Learning*, dan *Experiential Learning* sangat relevan diterapkan karena mendorong siswa belajar melalui pengalaman langsung (Kolb, 1984).

1. Berbasis Masalah Nyata

Guru perlu menghadirkan masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, bagaimana cara mengelola uang saku agar cukup satu minggu, bagaimana memulai usaha kecil dengan modal Rp100.000, atau bagaimana menjual

produk lokal agar diminati generasi muda. Dengan cara ini, siswa belajar berpikir kritis sekaligus memecahkan persoalan nyata.

2. Berbasis Proyek Usaha

Sekolah perlu memberi ruang praktik kewirausahaan melalui proyek usaha sederhana. Contohnya kegiatan Market Day di sekolah. Dalam kegiatan ini siswa dibagi dalam kelompok, lalu merancang produk, menghitung modal, menentukan harga jual, membuat strategi promosi, dan menjual produk secara langsung. Setelah itu siswa diminta mengevaluasi keuntungan, kerugian, dan kendala usaha. Penelitian Hasanah, Sojanah, dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan berbasis praktik berpengaruh positif terhadap kesiapan berwirausaha siswa SMK.

3. Integrasi Literasi Digital

Di era digital, kewirausahaan harus dikaitkan dengan teknologi. Peserta didik perlu diajarkan membuat promosi melalui media sosial, memanfaatkan marketplace, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, dan membuat desain pemasaran digital. Hal ini penting karena pola bisnis modern bergerak ke arah ekonomi digital.

4. Menanamkan Mindset Entrepreneur

Kewirausahaan bukan hanya soal mencari untung, tetapi keberanian mengambil risiko, kreatif melihat peluang, inovatif, dan pantang menyerah. Menurut Dweck (2006), individu dengan growth mindset lebih mudah berkembang karena melihat kegagalan sebagai proses belajar. Karena itu, siswa harus dibiasakan berani mencoba meskipun belum berhasil.

5. Penilaian Autentik

Evaluasi pembelajaran kewirausahaan tidak cukup dengan tes tertulis. Penilaian seharusnya mencakup proposal usaha, laporan keuangan, kualitas produk, kreativitas promosi, kerja sama tim, dan kemampuan presentasi. Dengan begitu, kompetensi siswa dinilai secara nyata dan komprehensif.

Contoh Implementasi di Sekolah

Misalnya pada mata pelajaran IPS kelas XI dengan tema “*Usaha Ramah Lingkungan*”. Guru mengangkat masalah banyaknya sampah plastik di sekolah. Siswa kemudian diminta merancang usaha berbasis solusi lingkungan, seperti membuat tas kain dari bahan bekas, botol minum ramah lingkungan, makanan sehat tanpa plastik, atau kerajinan dari barang daur ulang.

Setelah itu siswa melakukan tahapan berikut:

1. Menyusun rencana usaha.
2. Menghitung modal dan harga jual.

3. Membuat promosi melalui Instagram/TikTok sekolah.
4. Menjual produk saat bazar sekolah.
5. Menyusun laporan laba-rugi.
6. Melakukan refleksi atas keberhasilan dan kendala usaha.

Dari kegiatan tersebut siswa memperoleh *hard skills* seperti manajemen keuangan, pemasaran, produksi, dan negosiasi. Mereka juga memperoleh *soft skills* berupa komunikasi, kepemimpinan, tanggung jawab, kreativitas, dan kerja sama tim. Penelitian Soelaiman, Keni, dan Chin (2024) menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap *self-efficacy* dan *entrepreneurial intention* peserta didik.

Referensi :

- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.
- Hasanah, M. N., Sojanah, J., & Santoso, B. (2023). Pengaruh pendidikan kewirausahaan dan model pembelajaran teaching factory terhadap kesiapan berwirausaha siswa di SMK. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 21–27.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics*. McGraw-Hill.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soelaiman, L., Keni, K., & Chin, T. L. (2024). The effectiveness of entrepreneurship education on students' self-efficacy and entrepreneurial intention. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 14(1), 75–96.

4. **Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600 juta**

pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan, juga perlu ditingkatkan. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan disoroti oleh Tujuan 8 yang bertujuan untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua”. Pemerintah Indonesia akan mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai badan koordinator untuk penerapan SDGs yang bersifat lintas sektor. Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>

Berdasarkan kutipan artikel tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut: a. Berikan analisis Anda tentang keterkaitan pertumbuhan penduduk, ekonomi dan kesejahteraan! b. Mengapa perlu keseimbangan pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan lingkungan? c. Bagaimana mewujudkan SDM Unggul melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan? d. Berikan contoh nyata keberlanjutan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah Anda!

Jawaban:

a. Analisis keterkaitan pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan kesejahteraan

Pertumbuhan penduduk memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penduduk merupakan modal dasar pembangunan karena berfungsi sebagai tenaga kerja, konsumen, dan pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk usia produktif, semakin besar pula potensi produksi dan konsumsi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2015).

Namun, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat menjadi beban apabila tidak diimbangi kualitas sumber daya manusia, lapangan pekerjaan, dan pelayanan sosial yang memadai. Akibatnya muncul pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Penelitian Bloom, Canning, dan Sevilla (2003) menjelaskan bahwa struktur penduduk usia produktif dapat menjadi bonus demografi jika didukung pendidikan, kesehatan, dan kebijakan ekonomi yang tepat.

Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berlangsung hingga 2035. Jika tenaga kerja produktif mampu diserap industri dan sektor usaha, maka pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan membaik. Sebaliknya, jika kesempatan

kerja terbatas, maka bonus demografi berubah menjadi beban sosial. Penelitian Prasetyo dan Zuhdi (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan ketika disertai distribusi pendapatan yang lebih baik.

Dengan demikian, pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan kesejahteraan memiliki hubungan timbal balik. Pertumbuhan penduduk yang berkualitas mendorong ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Mengapa perlu keseimbangan pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, dan lingkungan?

Keseimbangan ketiga aspek tersebut penting karena pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi sering kali menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi memang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja, tetapi tanpa pembangunan manusia, masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menikmati hasil pembangunan tersebut.

Menurut UNDP (2020), pembangunan manusia diukur melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Jika ekonomi tumbuh tetapi pendidikan rendah dan akses kesehatan terbatas, maka kualitas hidup masyarakat tetap tertinggal.

Selain itu, pembangunan yang mengabaikan lingkungan akan menimbulkan masalah jangka panjang seperti banjir, polusi, kekeringan, dan penurunan kualitas lahan. Konsep sustainable development menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang (Brundtland Commission, 1987).

Penelitian Stern (2004) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan akan meningkatkan emisi dan kerusakan ekologi. Karena itu, pembangunan harus menjaga keseimbangan:

- 1) **Ekonomi** = menciptakan pertumbuhan dan kerja layak.
- 2) **Manusia** = meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
- 3) **Lingkungan** = menjaga kelestarian sumber daya alam.

Dengan keseimbangan tersebut, pembangunan akan berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.

c. Bagaimana mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan?

SDM unggul dapat diwujudkan melalui pendidikan berkualitas dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pendidikan berfungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter individu sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Becker (1993) menyebut pendidikan sebagai investasi human capital yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Pendidikan berkualitas dan relevan
Sekolah perlu menekankan literasi, numerasi, teknologi digital, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan dunia kerja modern.
- 2) Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja
SMK, politeknik, dan balai latihan kerja perlu diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan siap pakai. Penelitian Hanushek dan Woessmann (2020) menunjukkan kualitas pendidikan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- 3) Penguatan kewirausahaan
Peserta didik perlu didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembelajaran bisnis, koperasi sekolah, dan inkubator usaha. Ini penting untuk mengurangi pengangguran usia muda.
- 4) Pembangunan ekonomi inklusif
Pemerintah harus memperluas infrastruktur, internet, akses modal UMKM, dan industri padat karya agar tenaga kerja terserap.
- 5) Ekonomi hijau dan berkelanjutan.
SDM unggul masa depan harus memahami energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian modern, dan bisnis ramah lingkungan.

Dengan kombinasi pendidikan dan ekonomi berkelanjutan, masyarakat tidak hanya produktif tetapi juga adaptif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

d. Contoh nyata keberlanjutan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah Anda

Di wilayah Lampung, contoh keberlanjutan ekonomi terlihat pada pengembangan sektor pertanian dan UMKM berbasis komoditas lokal seperti kopi, singkong, pisang, dan lada. Produk singkong diolah menjadi keripik, tapioka, dan makanan olahan sehingga memiliki nilai tambah ekonomi. Hal ini membantu peningkatan pendapatan masyarakat desa dan membuka lapangan kerja baru.

Penelitian Sari dan Hidayat (2022) menunjukkan bahwa pengembangan UMKM berbasis agroindustri di Lampung berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

Dari sisi pembangunan manusia, pemerintah daerah terus meningkatkan akses pendidikan, beasiswa, layanan kesehatan masyarakat, serta program penurunan stunting. Sekolah-sekolah juga mulai menerapkan digitalisasi pembelajaran dan penguatan keterampilan vokasional.

Contoh lainnya adalah generasi muda di Lampung yang memasarkan kopi robusta lokal melalui media sosial dan marketplace. Ini menunjukkan sinergi antara peningkatan kualitas SDM, teknologi digital, dan potensi ekonomi daerah.

Referensi :

- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. University of Chicago Press.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). *The Demographic Dividend*. RAND Corporation.
- Brundtland Commission. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge capital, and economic growth. *The Economics of Education Review*, 75, 101971.
- Prasetyo, P. E., & Zuhdi, U. (2013). The government expenditure efficiency towards the human development. *Procedia Economics and Finance*, 5, 615–622.
- Sari, D., & Hidayat, R. (2022). Pengembangan UMKM agroindustri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 23(2), 115–129.
- Stern, D. I. (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. *World Development*, 32(8), 1419–1439.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020*. New York: UNDP.

- 5. Di era digital dan pasca-pandemi, terjadi perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, termasuk meningkatnya ekonomi digital, e-commerce, dan tren sustainable entrepreneurship. Namun, banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala:**
- literasi digital rendah
 - keterbatasan akses pasar global
 - kurangnya inovasi berbasis keberlanjutan

Sebagai lulusan S2 Pendidikan IPS, Anda diharapkan mampu mengintegrasikan nilai kewirausahaan dalam pembelajaran. Pertanyaan 1. Analisis tantangan utama UMKM Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital dan globalisasi. 2. Rancang model pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan (entrepreneurship education) yang mampu meningkatkan kemampuan inovasi mahasiswa/siswa. 3. Jelaskan bagaimana konsep kewirausahaan berkelanjutan (sustainable entrepreneurship) dapat diintegrasikan dalam model tersebut.

Jawaban:

Era digital dan pasca-pandemi telah mengubah lanskap ekonomi global secara signifikan. Pola konsumsi masyarakat bergeser dari transaksi konvensional menuju platform digital, e-commerce, pembayaran nontunai, serta preferensi terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di Indonesia, perubahan ini membuka peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat sektor ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB)

nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun demikian, banyak UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama literasi digital rendah, keterbatasan akses pasar global, dan minimnya inovasi berbasis keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, lulusan S2 Pendidikan IPS dituntut mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga membangun kompetensi kewirausahaan generasi muda.

1. Analisis Tantangan Utama UMKM Indonesia dalam Menghadapi Ekonomi Digital dan Globalisasi

a. Rendahnya Literasi Digital

Tantangan terbesar UMKM Indonesia adalah rendahnya kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Banyak pelaku UMKM masih terbatas menggunakan media sosial, marketplace, sistem pembayaran digital, dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Akibatnya, daya saing produk menjadi rendah dibanding usaha yang sudah terdigitalisasi. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain (2023), ekonomi digital Asia Tenggara tumbuh pesat, tetapi pelaku usaha kecil masih tertinggal dalam transformasi digital.

Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai, tetapi juga mencakup strategi pemasaran digital, keamanan siber, branding, dan analisis pasar online. Jika UMKM tidak beradaptasi, maka mereka akan kalah bersaing di pasar yang semakin berbasis data dan teknologi.

b. Keterbatasan Akses Pasar Global

Globalisasi membuka peluang ekspor melalui platform digital. Namun banyak UMKM Indonesia belum mampu masuk ke rantai pasar global karena kendala kualitas produk, sertifikasi, standar internasional, pengemasan, bahasa, dan logistik. Banyak produk lokal sebenarnya unggul, tetapi kalah dari sisi branding dan konsistensi kualitas.

Menurut Tambunan (2019), persoalan klasik UMKM Indonesia bukan hanya modal, tetapi juga keterbatasan jaringan pemasaran dan lemahnya integrasi ke pasar internasional. Artinya, UMKM membutuhkan pendampingan bisnis dan dukungan kebijakan ekspor yang lebih konkret.

c. Minimnya Inovasi Berbasis Keberlanjutan

Saat ini konsumen semakin memperhatikan produk ramah lingkungan, etis, dan berkelanjutan. Namun banyak UMKM masih fokus pada penjualan jangka pendek tanpa mempertimbangkan efisiensi energi, pengurangan limbah, bahan baku hijau, dan dampak sosial. Padahal tren global menunjukkan bahwa green business dan circular economy semakin diminati.

Penelitian Schaltegger dan Wagner (2011) menjelaskan bahwa inovasi bisnis berkelanjutan menjadi faktor penting daya saing perusahaan masa depan. Jika UMKM Indonesia lambat beradaptasi, maka mereka akan tertinggal dalam pasar global yang semakin peduli lingkungan.

d. Keterbatasan SDM dan Manajemen Usaha

Sebagian UMKM masih dikelola secara tradisional, tanpa pencatatan keuangan rapi, strategi pemasaran, atau perencanaan bisnis jangka panjang. Hal ini menyebabkan usaha sulit berkembang dan rentan bangkrut ketika terjadi krisis seperti pandemi.

2. Rancang Model Pembelajaran IPS Berbasis Kewirausahaan (Entrepreneurship Education)

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan model pembelajaran IPS yang kontekstual dan inovatif. Model yang dapat diterapkan adalah:

Model IPS-EcoPreneur Project Based Learning (PjBL)

Model ini menggabungkan IPS, kewirausahaan, teknologi digital, dan problem solving sosial-ekonomi.

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa/siswa mampu:

1. Menganalisis masalah ekonomi masyarakat sekitar.
2. Menghasilkan ide usaha kreatif berbasis kebutuhan lokal.
3. Menggunakan teknologi digital untuk pemasaran.
4. Menumbuhkan jiwa inovatif, kolaboratif, dan mandiri.
5. Memahami bisnis berkelanjutan.

Sintaks Pembelajaran

Tahap 1: Identifikasi Masalah Sosial-Ekonomi

Guru meminta siswa mengamati masalah di lingkungan sekitar, misalnya:

- sampah plastik meningkat
- pengangguran pemuda
- produk lokal sulit dipasarkan
- limbah pertanian tidak dimanfaatkan

Tahap 2: Eksplorasi Peluang Usaha

Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mencari peluang usaha dari masalah tersebut. Contoh:

- limbah pisang menjadi keripik sehat
- kopi lokal dijual online
- kerajinan daur ulang plastik
- jasa desain digital UMKM lokal

Tahap 3: Perancangan Business Plan

Siswa menyusun:

- nama usaha
- target pasar
- modal awal
- strategi promosi digital
- analisis SWOT
- estimasi keuntungan

Tahap 4: Produksi dan Simulasi Penjualan

Produk diuji coba dan dipasarkan melalui:

- Instagram
- TikTok Shop
- Marketplace sekolah/kampus
- Bazar kewirausahaan

Tahap 5: Evaluasi dan Refleksi

Siswa mengevaluasi:

- respon konsumen
- inovasi produk
- strategi pemasaran
- keberlanjutan usaha

Penilaian

Penilaian dilakukan secara autentik meliputi:

- kreativitas ide usaha
- kerja sama tim
- inovasi digital
- presentasi bisnis
- dampak sosial-lingkungan

Menurut Neck dan Greene (2011), entrepreneurship education akan efektif jika siswa belajar melalui praktik, eksperimen, dan pengalaman nyata, bukan sekadar teori.

3. Integrasi Konsep Sustainable Entrepreneurship dalam Model

Sustainable entrepreneurship

Kewirausahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (Dean & McMullen, 2007). Konsep ini dapat diintegrasikan dalam model pembelajaran di atas melalui beberapa cara:

a. Profit, People, Planet

Siswa diajarkan konsep triple bottom line:

- Profit = usaha menghasilkan keuntungan
- People = memberi manfaat sosial
- Planet = menjaga lingkungan

Contoh: usaha minuman herbal dengan botol isi ulang. Menguntungkan, menyehatkan masyarakat, dan mengurangi sampah plastik.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Produk bisnis dirancang dari potensi daerah sekitar seperti kopi Lampung, pisang, singkong, kerajinan tapis, atau limbah pertanian. Ini meningkatkan ekonomi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan produk impor.

c. Inovasi Ramah Lingkungan

Siswa diarahkan menggunakan:

- kemasan biodegradable
- daur ulang bahan bekas
- produksi hemat energi
- pemasaran digital minim kertas

d. Social Entrepreneurship

Bisnis tidak hanya untuk pribadi, tetapi memberi dampak sosial. Contoh:

- pelatihan digital bagi UMKM desa
- usaha yang mempekerjakan warga sekitar
- penjualan produk untuk dana sosial sekolah

e. Refleksi Etika Bisnis

Pembelajaran IPS menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial dalam berwirausaha.

Contoh Implementasi Nyata

Di Lampung, siswa dapat membuat proyek:

“Eco Snack Lampung”

Mengolah pisang dan singkong lokal menjadi camilan sehat dengan kemasan ramah lingkungan, dipasarkan melalui Instagram dan marketplace.

Nilai IPS yang dipelajari:

- ekonomi lokal
- pemberdayaan masyarakat
- digital marketing
- keberlanjutan lingkungan
- kewirausahaan kreatif

Referensi :

Dean, T. J., & McMullen, J. S. (2007). Toward a theory of sustainable entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 22(1), 50–76.

Google, Temasek, & Bain. (2023). *e-Conomy SEA Report 2023*.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Data UMKM Indonesia*. Jakarta.

- Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: known worlds and new frontiers. *Journal of Small Business Management*, 49(1), 55–70.
- Schaltegger, S., & Wagner, M. (2011). Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation. *Business Strategy and the Environment*, 20(4), 222–237.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES.